



Kritik Ekologi Poskolonial :

Dari Kontrol Pembangunan yang Berkelanjutan menuju Praksis Ekologi Bersama

Ivanovich Agusta

ABSTRAK

Kebijakan pembangunan yang berkelanjutan paling tepat dipahami sebagai konstruksi kebijakan ekologi yang disusun oleh Utara untuk mendominasi Selatan. Konsep pembangunan yang berkelanjutan pertama kali muncul di Eropa, kemudian sejak dekade 1990-an dijadikan komoditas utang luar negeri bagi Selatan. Diskursus pembangunan yang berkelanjutan dikuatkan dan dimaterialisasikan melalui lembaga-lembaga pendidikan, ekonomi, hingga teknologi. Artikel ini mengajukan ruang kritik baru melalui susunan baru matriks teori-teori ekologi. Untuk mengatasi kontrol Utara tersebut diajukan hibriditas sebagai basis kebijakan ekologi. Hibriditas memungkinkan solidaritas lintas kelas dan teritorial lokal hingga internasional, mengatasi penyekatan yang tersusun semula, sekaligus mengembangkan sifat dinamis kebijakan sebagai proses “menjadi” secara terus menerus.

Kata Kunci: hibriditas, solidaritas lintas kelas, dekonstruksi

KRISIS KEBIJAKAN EKOLOGI

Pada satu sisi, pertimbangan terhadap lingkungan dalam pembangunan merupakan kemajuan pemikiran modernisasi, terutama sejak dekade 1970-an (Crocker, 1999; Sheperd, 1998)—meskipun pemikiran awal ekonomi lingkungan sudah dimulai sejak awal abad ke 20 oleh Gray. Dalam modernisme lingkungan ini, variabel lingkungan ditambahkan di antara variabel lain dalam rumusan ekonomi. Variabel baru ini menjadi faktor koreksi bagi ukuran pertumbuhan serta kesejahteraan wilayah dan masyarakat (Boyce, 2002; Siniscalco, 1999). Pada awal pertumbuhan ilmu ekonomi, harga alam diperlakukan sebagai sewa (terhadap orang yang mengelola atau menguasainya), namun kini alam dipandang sebagai bagian dari analisis pasar secara keseluruhan, yang diarahkan untuk mengalokasikan sumberdaya secara tepat (terutama kepada generasi penerus). Pada posisi yang sama, dalam ilmu sosial semula terdapat perbedaan antara alam dan manusia, namun kini dipercaya keterlekatan alam dalam setiap tindakan manusia (Barry, 1999; Lidskog, 2001). Sejalan dengan perkembangan kedua ilmu tersebut, ekologi semakin ditekankan untuk menjaga stabilitas atau preservasi alam (Walker, 2005).

Namun demikian, persoalan modernisme lingkungan berawal dari sini. Hukum termodinamika pertama dan kedua, yang mengetengahkan kestabilan energi berikut

perpindahannya dalam sistem tertutup hanya menghasilkan pemikiran tentang preservasi lingkungan tersebut. Meskipun sistem tertutup dalam hukum tersebut telah diperluas sehingga menghasilkan dua arah perubahan energi dan materi dalam sistem yang sama atau terpisah (berbasis pemikiran Volterra dan Lotka), namun dikaitkan dengan ketiadaan mesin yang menghasilkan entropi nol menunjukkan kesulitan teknis penghitungan dalam ekonomi lingkungan. Lebih jauh lagi, ragam stabilitas dalam satu sistem (pada teori sistem terbuka di atas) menyulitkan penerimaan kembali tesis evolusi. Penolakan tesis evolusi pada akhirnya menyulitkan pemodelan dan perencanaan (Proops, 1999). Tidak mengherankan bahwa secara metodologis masih belum ditemukan ukuran yang memadai untuk mempertimbangkan seluruh aspek lingkungan (Kuik dan Gilbert, 1999).

Kritik lainnya –yang lebih radikal– disampaikan oleh ekologi politik (*political ecology*). Kaidah kesetimbangan (alam maupun sosial) yang mendasari modernisme lingkungan dipandang sebagai upaya untuk mempertahankan *status quo* golongan elite, sehingga menjadi sumber eksploitasi kelas atas kepada kelas bawah (Bryant, 1998; Robbin, 2004) –kecuali sebagian kecil ilmuwan yang mengawinkan ekologi politik dengan kebijakan pembangunan sejalan dengan perkawinan kaidah kesetimbangan dan ketidaksetimbangan (misalnya Hayward (1994)). Membawa persoalan lingkungan ke tingkat internasional justru meluaskan eksploitasi dari negara-negara Utara yang kaya kepada negara-negara Selatan yang miskin (Bryant, 1998; Escobar, 1996, 1998).

Meskipun telah menyulitkan landasan modernisme lingkungan untuk merumuskan pembangunan lebih lanjut (Proops, 1999), namun kritik terhadap wacana politisasi lingkungan masih menyisakan persoalan, yaitu untuk menyusun kembali konstruksi ekologi yang baru dan mematerialkannya dalam kebijakan politis (Luke, 2002; Naess, 1986; Walker, 2006). *Pertama*, politisi secara umum menghindari analisis marxian dalam ekologi politik, padahal menghilangkan aspek kritis dalam ekologi politik dapat menghilangkan ciri utama ilmu baru ini. *Kedua*, para ilmuwan sendiri tidak mampu mengusulkan konsep masyarakat baru yang sesuai dengan kaidah-kaidah ekologi politik, bahkan sebagian pemikiran hendak kembali kepada komunitas primitif (utopia primitif). Seharusnya konsep tersebut merupakan narasi tandingan dari modernisme lingkungan. *Ketiga*, skala praksis bagi ekologi politik seringkali terbatas pada masyarakat lokal, yang tidak sebanding dengan kebijakan nasional setingkat negara atau kebijakan regional di antara beberapa negara. *Keempat*, skala gerakan *deep ecology* bahkan tertuju pada perubahan refleksi tindakan individual, sehingga sulit diterapkan pada aspek kebijakan yang menghendaki tindakan kolektif.

Tulisan ini hendak mengeksplorasi peluang-peluang untuk merekonstruksi kebijakan ekologi secara kritis. Dari rumusan permasalahan di atas terlihat peluang penyelesaiannya, yaitu dengan menyusun analisis kritis yang lebih memadai untuk menilai hubungan sinergis atau sebaliknya antagonis antar pihak dalam masyarakat. Susunan kebijakan ekologis yang bersifat kritis perlu disusun bagi kepentingan solidaritas antar pihak-pihak tersebut. Susunan kebijakan tersebut juga perlu menunjang peluang solidaritas pada level lokal hingga internasional.

Teori poskolonial hendak dijadikan jalan menuju tujuan penulisan artikel ini. Teori ini diturunkan dari teori posmodern (Said, 1995, 2001; Venn, 2006) –di tempat lain

dinamai postrukturalisme (Petersen, *et.al.*, 1999; Walker, 2005)—yang dapat dipraktekkan di negara-negara bekas jajahan Eropa, Amerika Utara, dan Jepang. Banyak pihak yang menyangsikan kemungkinan analisis diskursus ke dalam pola tindakan sehari-hari, karena dipandang bergerak semata-mata pada ranah abstrak (Barry, 1999) dan tidak konsisten melihat gejala sosial (Proops, 1999; Walker, 2005). Untuk menjawab kritik tersebut, hendak dikemukakan bahwa diskursus tidak bergerak sendirian melainkan membuka pemikiran baru tentang alam dan tindakan sosial. Dengan alur demikian diskursus dimaterialkan ke dalam tindakan manusia dalam memperlakukan alam sesuai pandangannya atau ideologinya (Althusser, 2004; Said, 2001, 1995). Aparatus ideologi penguasa bisa menghasilkan dominasi diskursus kepada lapisan bawah, sehingga di sini hendak disusun diskursus tandingan yang lebih sesuai untuk melihat realitas ekologis dan sosial. Suatu aliran diskursus lainnya yang berujung kepada nihilisme memang menafikan keteraturan, misalnya pada Nietzsche dan Sartre—sehingga memustahilkan kebijakan politis. Akan tetapi dekonstruksi ala Derrida (Al Fayyadl, 2005) dalam rangka membentuk masyarakat baru yang tidak semata-mata dimanipulasi oleh akal (logosentrisme) – sebagaimana terwujud dalam pembangunan dan modernisasi—masih memungkinkan untuk menyusun politik poskolonial, yaitu politik posdevelopmentalisme.

Pijakan awal disusun dengan mengkritik kebijakan lingkungan yang sudah dikenal luas, yaitu pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*). Aspek-aspek pembangunan berkelanjutan yang sudah dikembangkan mencakup ekoturisme, kehutanan, sektor informal, perkotaan. Kritik poskolonial atau posmodern pernah dilakukan terhadap kebijakan ini (Banerjee, 2003; Escobar, 1996; Haque, 1999), terutama didasari kritik terhadap rasionalitas ekonomi dalam kebijakan ini. Mengarahkan kritik terhadap basis rasional ekonomi memang mampu menunjukkan pemahaman yang dangkal berikut komodifikasi terhadap ekologi –sebagaimana terbaca di atas. Akan tetapi jalur demikian masih akan sulit digunakan untuk menyusun politik bagi praksis yang kritis bersama alam, karena menanggalkan aspek ekologi. Sudut pandang alternatif hendak ditempuh, yaitu diawali perspektif filsafat kritis tentang alam, kemudian diikuti konstruksi kritis bagi praksis.

FILSAFAT ALAM DAN ETIKA UNTUK TEORI POSKOLONIAL

Kategorisasi Filosofis yang Tidak Memadai

Para filsuf menyusun sistem filsafatnya menurut pertanyaan pokok yang paling menarik baginya, yang dipandang penting karena pemecahannya memungkinkan manusia menjalani kehidupan secara lebih bermakna. Awal perbedaan pertanyaan pokok tersebut berkonsekuensi pada keragaman pemikiran filosofis.

Dalam banyak tulisan ekologi, landasan pertanyaan filosofis berawal dari perbedaan kealaman (*nature*) dan kebudayaan (*culture*) (Macnaghten dan Urry, 1995). Kelompok yang tergolong ke dalam kealaman meliputi pandangan esensialisme, utilitarian. Kelompok kealaman melandasi modernisme ekologis. Kelompok kebudayaan, sebaliknya, mencakup anti-esensialisme. Ekologi politik masuk ke dalam kelompok terakhir (Escobar, 1999).

Meskipun kategorisasi di atas sepertinya tidak dipermasalahkan lagi, namun sebenarnya masih muncul persoalan di dalamnya. *Pertama*, filsafat alam telah berkembang dari obyektivisme ke arah subyektivisme. Prinsip ketidakpastian dari Heisenberg dan prinsip komplementaritas dari Bohr melawan asumsi fisika klasik (Wospakrik, 2005). Di sini posisi dan percepatan entitas fisik “atom” tidak dapat dibentuk secara simultan. Deskripsi kekakuan ruang-waktu dan urutan kekakuan sebab-akibat dalam proses individual tidak dapat diwujudkan secara simultan. Satu atau lainnya harus dikorbankan. Selain itu, energi dan materi –yang menjadi pusat perhatian ekologi—bersifat relatif dalam hubungannya dengan kecepatan –yang berarti juga waktu—dalam teori relativitas. Subyektivisme (sudut pandangan *knower* terhadap *knowledge*) dalam ilmu alam ini menyulitkan ciri pembedaan *nature* dan *culture* atas obyektivisme dan subyektivisme.

Kedua, meskipun agak aneh, pembahasan tentang ekologi senantiasa dikaitkan dengan etika lingkungan. Modernisme lingkungan dan ekologi politik selalu memiliki landasan etis. Minimal terdapat dua persoalan yang muncul, *pertama*, bagi modernisme lingkungan, penerimaan teori etis menyulitkannya merumuskan penghitungan yang obyektif (Kuik dan Gilbert, 1999). Hal ini agak paradoks jika dibandingkan dengan fisika kuantum yang tetap bisa melakukan penghitungan meskipun posisinya tidak selamanya subyektif. *Kedua*, ekologi politik yang hendak dikembangkan dari posstrukturalisme, posmodern atau poskolonial masih menganut teori etika yang memiliki peluang dominasi yang kuat (bangsawan, Barat, logos) kepada si lemah (lapisan bawah, Timur). Di sinipun muncul paradoks manakala Nietzsche dan Sartre –yang melandasi posmodern—justru menolak teori etika dalam rangka membuka pemikiran baru yang tidak menindas (Deleuze, 2002; Nietzsche, 2000, 2004).

Sampai di sini terlihat bahwa kategorisasi baru perlu disusun agar lebih sesuai dengan pemikiran baru ekologi politik. Pembedaan kealaman dan kebudayaan sulit untuk dipegang kembali. Kategorisasi yang lebih dibutuhkan ialah membedakan ragam etika lingkungan, termasuk posisi melawan etika sendiri.

Filsafat Alam Mutakhir untuk Ekologi

Terdapat tiga pertanyaan pokok filsafat terhadap alam (Hunnex, 2004). Apakah yang dimaksud dengan dunia fisik? Jawaban pertanyaan ini menerangkan teori-teori realitas fisik. Apa itu kehidupan? Jawabannya menerangkan teori-teori tentang asal muasal dan sifat dari realitas kehidupan. Apa yang dimaksud dengan nyata yang sebenarnya? Jawabannya akan menerangkan teori-teori tentang realitas, contohnya ontologi.

Fisika kontemporer menemukan bahwa pendekatan klasik hanya memadai untuk sistem tertentu yang bergerak dalam kecepatan sedang, yang memberikan perubahan kecil dan umumnya tidak beraturan. Pada percepatan mendekati cahaya, perubahan menjadi cepat sekali.

Fisika kontemporer berkonsekuensi pada peluang penurunan realitas fisik menjadi energi (Wospakrik, 2005). Energi yang bergerak dengan kecepatan cahaya ialah radiasi. Energi yang terkonsentrasi adalah massa. Massa dapat diubah menjadi energi melalui radiasi. Tanpa energi maka tiada massa, tiada ruang, maupun tanpa waktu. Pada sistem pergerakan 85 persen kecepatan cahaya maka massa akan

berlipat ganda, namun pada semua sistem pergerakan yang ada ia akan berubah dalam rasio yang sama dan tidak dapat diukur.

Kehidupan terdapat dalam organisme yang mampu melakukan sebagian atau seluruh hal-hal (Hunnex, 2004): merespons situasi, reproduksi, metabolisme, beradaptasi dengan lingkungan, memelihara diri sendiri, dan melindungi diri sendiri. Asumsi monogenetik tentang teori asal mula kehidupan terdiri atas, *pertama*, ciptaan Tuhan. Contohnya supernaturalisme dan teisme Bibel. *Kedua*, asal kehidupan dari binatang, sebagaimana diungkapkan oleh Anaxagoras, Arrhenius, Helmholtz, Kelvin. *Ketiga*, hylozoisme atau animisme, di mana semua yang ada di alam ini dipandang memiliki kehidupan. Pandangan ini terdapat dalam primitivisme, pra-Socrates, Milesian. *Keempat*, evolusi dari materi anorganik. Ini adalah pandangan yang lebih luas, berasal dari pemikiran Anaximander, Lucretius. Organisme kompleks yang ada sekarang merupakan turunan dari organisme-organisme sederhana. Pemikiran ini diakui berdasarkan bukti dari tempat-tempat temuan fosil, penyebaran secara geografis, perbandingan anatomi, embriologi, daerah investigasi, dan kemiripan bentuk “kembali” kepada bentuk “nenek moyangnya”.

Teori-teori tentang sifat realitas tertinggi berkembang menjadi kompleks, sehingga dibutuhkan pembedaan dan penhubungan kembali di antara teori-teori tersebut. Meskipun penjelasan monistik dan dualistik cenderung kepada pendapat idealistik, mistik atau supernaturalistik, dan penjelasan pluralistik cenderung kepada realistik, namun kecenderungan-kecenderungan tersebut tidak terlalu penting (Hunnex, 2004). Metafisika personalisme, misalnya, berbeda dengan pluralistik, dan realisme pluralistik Katolik (neo-Aristotelianisme) menganut supernaturalisme. Klasifikasi kasar juga dapat dilakukan dalam bentuk monisme, dualisme dan pluralisme. Pembedaan teori realitas lainnya dapat berupa naturalistik dan non-naturalistik. Dalam naturalistik, alam yang dirasakan dalam fenomena adalah dari realitas yang dapat diketahui. Non-naturalistik berpendapat bahwa pendapat tersebut belum cukup, karena semua label dan pembedaan tidak mungkin dapat dihindari, sehingga harus menggunakan reservasi. Filsafat lebih merupakan kebangkitan kembali pemikiran, yang memperbaiki pemikiran sebelumnya.

Berdasarkan perkembangan maupun ragam filosofis di atas, maka pilihan dapat diambil. Sesuai dengan revolusi ilmu pengetahuan (Kuhn, 2002) pilihan teori realitas fisik paling tepat diambil dari temuan paling akhir, yaitu teori fisika kontemporer. Lihat **Tabel 1**. Pilihan paradigmatis juga perlu diambil di antara teori-teori tentang realitas, karena berkonsekuensi pada pengembangan ekologi politik. Pengembangan teori poskolonial dalam ekologi politik paling tepat didasarkan pada ontologi non-naturalistik yang memungkinkan individu, kelompok atau masyarakat untuk memaknai realitas dalam hubungannya dengan ekologi sekitarnya secara plural (Escobar, 1996; Venn, 2006). Sebagaimana ditemukan oleh Heidegger, ontologi tidak bersifat universal melainkan dibatasi oleh waktu –dan konsekuensinya juga dibatasi oleh ruang dan bentuk, sebagaimana hasil teori fisika kontemporer. Sebenarnya –karena secara pribadi berbasis paradigma keilmuan—saya memilih teori monogenetik berupa evolusi. Namun demikian, suatu pengembangan ekologi politik berbasis teori poskolonial yang menghargai pluralisme pemikiran justru menghendaki penerimaan seluruh teori monogenetik. Dalam kasus saya, misalnya,

berarti ilmuwan perlu memberikan posisi yang setara kepada penduduk lokal yang memegang posisi teoretis berbeda.

Pilihan posisi di atas berkonsekuensi pada dua persoalan. *Pertama*, penerimaan ontologi non-naturalistik merupakan kritik dan pembeda terhadap posisi ontologis modernisme lingkungan yang berasaskan ontologi naturalistik. Di atas posisi semacam ini sempat dibahas dalam konteks ilmu-ilmu sosial, namun kini memiliki landasan yang lebih kokoh karena dibahas dalam filsafat alam yang lebih dekat terkait dengan ekologi. *Kedua*, penerimaan seluruh posisi teori tentang kehidupan membutuhkan penjelasan lebih lanjut perihal hibriditas di antara posisi-posisi tersebut (Bryant, 1998; Escobar, 1999; Robbins, 2004). Banyak data lapangan antropologis dan sosiologis menunjukkan keberadaan seluruh teori berikut penganut-penganutnya di dunia, sehingga tepatlah berposisi pluralistik dalam hal ini.

Tabel 1. Ragam Filsafat Alam untuk Ekologi

Pertanyaan: Apakah yang dimaksud dengan dunia fisik?	Pertanyaan: Apa itu kehidupan?	Pertanyaan: Apa yang dimaksud dengan nyata yang sebenarnya?
Jawaban: teori-teori realitas fisik.	Jawaban: teori-teori tentang asal muasal dan sifat dari realitas kehidupan.	Jawaban: teori-teori tentang realitas
Jawaban 1: fisika klasik hanya memadai untuk sistem tertentu yang bergerak dalam kecepatan sedang, yang memberikan perubahan kecil dan umumnya tidak beraturan.	Jawaban 1: ciptaan Tuhan	Jawaban 1: naturalistik, alam yang dirasakan dalam fenomena adalah dari realitas yang dapat diketahui.
	Jawaban 2: asal kehidupan dari binatang	
Jawaban 2: Fisika kontemporer: peluang penurunan realitas fisik menjadi energi. Massa (energi terkonsentrasi) dapat diubah menjadi energi melalui radiasi (pergerakan kecepatan cahaya). Tanpa energi maka tiada massa, tiada ruang, maupun tanpa waktu.	Jawaban 3: hylozoisme atau animisme, di mana semua yang ada di alam ini dipandang memiliki kehidupan.	Jawaban 2: non-naturalistik, pendapat naturalistik belum cukup, karena semua label dan pembedaan tidak mungkin dapat dihindari, sehingga harus menggunakan reservasi.
	Jawaban 4: evolusi dari materi anorganik. Ini adalah pandangan yang lebih luas	

Sebenarnya posisi filsafat alam yang dipilih ini sudah memadai untuk mengembangkan ekologi politik berbasis teori poskolonial. Basis ontologi sudah terpenuhi, dan pilihan ontologi non-naturalistik sekaligus berimplikasi kepada pluralisme pemikiran sebagaimana dianut teori poskolonial. Namun demikian, upaya penyusunan kebijakan ekologis masih membutuhkan pembahasan etika untuk menentukan arah yang dituju. Pada satu sisi etika lingkungan sudah banyak dibahas, namun di sisi lain –konsekuensinya–dibutuhkan kritik yang mendalam untuk memilih satu etika lingkungan yang paling cocok bagi ekologi poskolonial.

Pengkategorian Ulang Etika untuk Ekologi

Etika –lebih daripada aspek filosofis lainnya—jauh lebih ditekankan dalam pembahasan ekologi. Tampaknya terdapat keyakinan kuat bahwa prioritas terhadap alam, lingkungan atau ekologi menuntut pengambilan sikap dan pengalaman manusia tertentu. Pendapat ini memiliki kelemahan, karena saya menemukan tidak ada keteraturan posisi etis pada filsuf (serta ilmuwan) dari posisi ontologis dan epistemologisnya. Seorang filsuf yang menganut ontologi realisme dapat saja berposisi subyektivisme, dan sebagainya. Posisi seseorang dalam etika juga bisa ditafsirkan berbeda-beda menurut ilmuwan penafsir yang berbeda (Hunnex, 2004). Dengan kata lain, masih dibutuhkan langkah-langkah menuju kesepakatan perihal kategorisasi etika lingkungan.

Barangkali pembahasan etika juga agak berlebihan. *Pertama*, sebagian teori-teori etika ekologi tersebut lebih tepat digolongkan ke dalam ontologi (misalnya teori penciptaan alam di atas) atau epistemologi (misalnya genealogi alam) –daripada aksiologi sendiri. Etika menurut Minteer dan Manning (1999), misalnya, mencakup proposisi alam ciptaan Tuhan, seluruh alam memiliki kehidupan, dan sebagainya. Dalam pembahasan teori posmodern atau poskolonial tentang lingkungan, banyak yang mendasarkan pada genealogi dan dekonstruksi (Callicot, 1990). Sebenarnya teori-teori posmodern mencakup hilangnya klaim kebenaran narasi besar dan logosentrisme, teori seksualitas, dan sebagainya (Best dan Kellner, 2003; Lyotard, 2004). Genealogi merupakan metode untuk mencapai teori-teori tersebut (Alvesson dan Sköldbberg, 2000; Denzin, 1997; Foucault, M. 2002; Robbins, 2004; Venn, 2006).

Kedua, pembahasan etika lingkungan hingga kini dibatasi asumsi bahwa teori etika dibutuhkan, padahal masih muncul peluang untuk menghindari teori etika. Hal ini berlaku bagi kelompok etika modernisme lingkungan (Routley, 1973) maupun etika ekologi politik (Smith, 2001). Penerimaan teori etika dibayangi kekhawatiran akan hegemoni, dominasi, atau determinasi yang terkumpul dalam narasi besar ciptaan lapisan atas kepada lapisan bawah. Hal ini tidak saja berlaku pada antroposentrisme maupun deontologi lingkungan dalam modernisme lingkungan, namun juga pada determinisme marxis (Palmer, 2002; Walker, 2005).

Ketiga, pembahasan tentang etika tidaklah sistematis, sebaliknya mencampuradukkan teori etika normatif dan metaetika. Teori normatif berkuat pada penilaian benar atau salah, sedangkan teori metaetika meneliti diskursus atau pernyataan tentang moralitas itu sendiri (Hunnex, 2004). Dengan demikian, teori normatif lebih tepat digunakan dalam debat, misalnya, tentang apakah alam memiliki moral sendiri atautakah tidak. Adapun teori metaetika menganalisis pernyataan etika lingkungan yang telah dinyatakan ahli maupun komunitas. Sayangnya, tulisan etika lingkungan masih menggolongkan seluruh teori langsung dalam tataran yang sama, misalnya Palmer (2002) menerakan sekaligus antroposentris, individualis-konsekuensial (etika normatif teleologis), individualis-deontologis (etika normatif deontologis), dan holistik (kembali ke etika normatif teleologis). Namun demikian, untuk masa depan ia memikirkan peluang etika pluralisme atau pragmatisme dan konstruksi sosial (yang dalam pandangannya tergolong metaetika kognitif)

Keempat, meskipun etika sebagai bagian dari filsafat menduduki posisi lebih abstrak, namun keragaman etika ekologi jauh lebih banyak daripada teori-teori yang dihasilkannya –dan bukan berlaku sebaliknya. Palmer (2002), misalnya, merangkum lima atau delapan teori etika di atas, namun hanya menemukan tiga mazhab atau teori-teori ekologi, yaitu ekologi dalam (*deep ecology*), ekofeminisme, dan pragmatisme lingkungan.

Kelima, sayangnya, sebagian dari teks etika lingkungan saling menafikan, bahkan tidak saling mengutip hasil pihak lain. Tampaknya –seiring perkembangan teori ekologi—etika hendak berkembang ke arah pengelompokan etika ekologi modern dan etika ekologi kritis (marxisme dan posmodernisme). Keadaan ini berlainan dari tradisi pemikiran filosofis, di mana pemikiran diarahkan untuk mengkritik posisi filosofis lain membangun sistem filsafat sendiri. Antologi etika lingkungan, misalnya, menguatkan etika di kalangan modernisme lingkungan, bahkan tulisan tentang perjalanan etika lingkungan (Palmer, 2002) tidak mencakup basis marxisme dan posmodernisme, juga tidak mengutip basis etika artikel-artikel ekologi politik – tidak ada juga konsep ekologi politik di sana. Tulisan-tulisan klasik etika lingkungan di sini, sebaliknya, tidak dikutip dalam pembahasan etika ekologi politik di tempat lain (misalnya Smith (2001)).

Oleh sebab itu sepantasnya di sini disusun kategorisasi baru yang memungkinkan pemahaman tentang alam secara beragam dapat dipetakan. Hasil pemetaan tersebut tersaji pada **Lampiran 1**. Teori etika mula-mula dibedakan menurut –sebagaimana dikemukakan di atas—teori etika normatif dan teori metaetika. Teori etika normatif mengidentifikasi satu atau beberapa prinsip moral universal sehingga setiap orang dapat menjadikannya sebagai petunjuk atau untuk menjustifikasi tingkah lakunya. Teori ini mengkaji benar atau salah, serta bersikap preskriptif dan substantif. Teori etika normatif terspesialisasi menjadi teori etika teleologis (mempertimbangkan konsekuensi dan nilai moral dari pemikiran dan tindakan) dan deontologis (pada deontologi formal mempertimbangkan kebaikan motif dengan ketaatan dan kewajiban, sedangkan pada deontologi intuisiionistik melihat kesesuaian yang tidak dapat dijelaskan).

Yang tergolong dalam teori teleologis ialah antroposentris, individualis-konsekuensial, holistik, ancaman fisik, spiritual-setan, gudang material kasar, dualisme religius, dualisme intelektual. **Lampiran 1** telah mencakup pernyataan-pernyataan representasi etika ini, dan dapat disimpulkan bahwa etika teleologis untuk memandang *alam itu baik* baru muncul setelah terlebih dahulu memberikan *konsekuensi yang baik kepada manusia*.

Teori deontologis mencakup etika individualis-deontologis, kewajiban spiritual/religius, hak-hak alam, dan *deep ecology*. Teori etika ini menunjukkan adanya *nilai pada alam* sehingga *manusia memiliki kewajiban moral untuk menghormatinya*.

Teori metaetik mengkaji pernyataan moral atau penilaian moral dan lebih bersifat dekriptif dan analisis. Teori ini dibedakan menurut teori kognitifis (pernyataan etis bersifat informatif) dan non-kognitifis (menolak bahwa pernyataan etis bersifat informatif atau pada dasarnya bersifat informatif).

Etika kognitifis terbagi atas supernaturalisme (diskursus moral berkaitan dengan fakta metafisik, terutama pandangan bahwa alam diciptakan Tuhan dan sakral),

naturalisme (diskursus moral berkaitan dengan fakta empiris), dan non-naturalisme (diskursus moral berkaitan dengan fakta-fakta moral, terutama kebaikan untuk masa datang). Naturalisme terbagi dalam teori subyektivisme yang menyatakan diskursus moral berkaitan dengan konflik kepentingan (alam menarik bagi manusia, atau manusia bersikap humanistik kepada alam), dan teori instrumentalisme yang menyatakan diskursus moral terkait dengan kepuasan manusia (alam digunakan bagi kualitas hidup manusia, yang akan dikelola secara efisien).

Etika non-kognitifis terdiri dari emotivisme (diskursus moral pada dasarnya merupakan ekspresi sikap, sebagaimana posisi-posisi postmodernisme), imperativisme (diskursus moral pada dasarnya mempengaruhi sikap, misalnya pada marxisme), preskriptivisme (diskursus moral pada dasarnya membimbing perilaku), teori alasan baik (diskursus moral harus dilakukan dengan fakta bahwa ia sangat relevan dengan evaluasi moral).

Upaya kategorisasi ulang tersebut menunjukkan peluang ekologi politik poststrukturalis atau poskolonial untuk duduk dalam posisi etika non-kognitifis. Perbedaan besar yang hendak disusun dari etika ekologi lain ialah penolakannya kepada narasi besar, yang muncul dalam teori-teori etika normatif serta metaetika kognitifis. Dengan menentang narasi besar—yang berarti menentang posisi etis lainnya tersebut—etika poskolonial memungkinkan penghormatan dan praksis bagi kelompok marjinal dan terencil.

Dalam ranah metaetika non-kognitifis sendiri, posisi ekologi poskolonial berbeda dari konstruksi sosial lingkungan yang berupaya mencari alasan-alasan yang dipandang *baik* sebelum memutuskan menerima pernyataan moral lingkungan. Pencarian alasan tersebut dapat menjadi lahan legitimasi baru bagi elite untuk mendominasi diskursus lingkungan meski di tingkat lokal. Teori poskolonial lebih mempercayai alasan yang timbul sebagai emosi dan sikap sadar diri secara individual.

TEORI POSKOLONIAL UNTUK EKOLOGI

Ragam Modernisme Ekologi dan Ekologi Politik

Sejalan dengan beragam etika lingkungan di atas, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ekologi juga beragam. Saya condong kepada pemikiran dialektika dalam menjelaskan keragaman pemikiran ekologi saat ini, daripada memandangnya secara evolutif di mana pemikiran yang lebih baru dipandang sekaligus lebih maju (misalnya pada Walker (2005), Robbins (2004)). Alasannya adalah, masing-masing pemikiran tersebut tetap dikembangkan hingga kini, misalnya antroposentrisme oleh Scherer, utilitarianisme oleh Sheperd, neo-Marxisme oleh Harvey, konstruktivisme kemodernan akhir oleh Beck, poststrukturalisme oleh Escobar (Glassman, 2006; Goldman dan Schurman, 2000). **Lampiran 2** menunjukkan teori antroposentrisme,¹

¹ Antroposentrisme lazim pula digunakan untuk menunjukkan pendekatan filsafat. Di sini antroposentrisme digunakan sebagai teori untuk menunjukkan ciri tertentu dari manajemen sumberdaya yang meyakini nilai kebenaran lingkungan yang diciptakan oleh manusia. Posisi ini berbeda dari teori utilitarian yang tidak mempersoalkan kebenaran nilai, melainkan meyakini klaim kebenaran nilai tersebut setelah berguna bagi kesejahteraan manusia. Keduanya menempati posisi etis berbeda.

utilitarian, *deep ecology*, ekologi marxis, konstruktivisme modernisme akhir, dan poskolonial/posstruktural.

Antroposentrisme dan utilitarian sama-sama tergolong ke dalam modernisme lingkungan, karena mempercayai satu sisi kemodernan sebagai kemajuan rasionalitas manusia. Hal ini sejajar dengan konsep ekologi yang digunakan, yaitu adaptasi, kesetimbangan (homeostasis), dan kesetimbangan ekologis. Antroposentrisme dan utilitarian dalam ekologi berkembang sejak dekade 1970-an. Keduanya memegang ontologi naturalistik, yang memandang realisme alam.

Keduanya berbeda dalam posisi etika. Antroposentrisme menduduki etika normatif, terutama teleologis yang memandang manusia bisa menciptakan etika lingkungan untuk menentukan tindakan yang benar dari yang salah. Oleh sebab itu manusia dipercaya mampu menjalankan manajemen terhadap lingkungannya (Hargrove, 1992; Norton 1984; Palmer, 2002). Hal ini ditunjukkan dengan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan yang bisa digunakan di seluruh dunia.

Utilitarian tidak mempercayai isi etika, melainkan mempertimbangkan proposisi etis tersebut demi sifat instrumental bagi kepentingan manusia –kadang-kadang juga ditambahkan dengan keadilan residual ala John Rawls (Minteer dan Manning, 1999). Berbasis teori ekonomi, utilitarian mengembangkan efisiensi untuk mengatasi kelangkaan sumberdaya alam. Untuk menunjang hal tersebut maka diperlukan preferensi yang benar dalam mengambil keputusan tentang alam dan pembangunan. Bisa jadi preferensi tersebut disetujui sebagai pilihan paling besar warga lokal – suatu bentuk demokrasi utilitarian (Costanza, 1996). Utilitarian juga meyakini kegunaan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan bagi seluruh masyarakat di dunia.

Setelah membicarakan modernisme lingkungan, kini disampaikan politik ekologi. Kesamaan posisi di sini ialah kritik atas kerusakan alam yang disebabkan oleh kemodernan, atau minimal satu sisi dari kemodernan. Sejalan dengan itu, konsep ekologi yang dikembangkan ialah instabilitas dan maladaptasi. Sementara stabilitas memungkinkan penerimaan kurva S yang menunjukkan arah evolutif menuju klimaks ekologi –konsekuensinya negara-negara Utara sebagai klimaks berarti yang paling maju—maka penolakannya untuk menciptakan konsep instabilitas ekologi memungkinkan kritik dari Selatan kepada Utara (Scoones, 1999).

Deep ecology juga menganut ontologi naturalistik. Etika dipercaya intrinsik dalam alam sehingga bersifat obyektif. Oleh karena itu alam perlu dihormati, namun sayang selama ini modernisasi justru merusak alam. Dengan membandingkan masyarakat tradisional yang memiliki resiko lebih kecil dibandingkan masyarakat modern ketika berhubungan dengan alam, maka *deep ecology* lebih menyukai tata cara pengelolaan alam secara tradisional, atau sebenarnya mendekati preservasi alam (Fox, 1984; Luke, 2002; Naess, 1984; Robbins, 2004).

Posisi yang bersifat lebih kritis terhadap hubungan kemodernan dan lingkungan dilakukan oleh marxisme ekologi. Mengambil sumber dari tulisan-tulisan Marx tua, posisi ini menyetujui adanya klaim kebenaran dalam etika lingkungan. Susunan etika disusun oleh manusia sendiri. Saya melihat posisi etika normatif inilah – bersama-sama ontologi naturalistik—kiranya yang menimbulkan kritik deterministik dalam marxisme ekologi. Berbasis teori moda produksi dari Marx,

teori ini memandang degradasi alam berasal dari eksploitasi buruh dan kelas bawah lain untuk mengelola alam demi kepentingan majikan dan kelas atas (Glassman, 2006; Robbins, 2004; Vlachou, 2002). Untuk masa kini, akumulasi surplus dari eksploitasi alam dan buruh tersebut lebih banyak mengalir ke negara maju dan korporat besar mereka.

Kritik terhadap pendekatan makro yang deterministik menghasilkan ekologi politik yang lebih berorientasi kepada pertarungan simbol politik terutama di tingkat lokal. Tekanan kajian diarahkan kepada gerakan lingkungan, politik diskursif dan simbolik, kelembagaan untuk basis kekuasaan, pengetahuan dan praksis.

Konstruktivisme modernisme akhir mulai menuju ontologi non-naturalistik, yang memandang kenyataan di luar realisme, atau minimal tidak semata-mata realisme naif. Sejalan dengan itu, diterima metaetika pada posisi kognitif. Dalam posisi non-naturalisme, informasi atau diskursus etis dipandang mampu menunjukkan posisi moral, meskipun pengujiannya dilakukan di luar itu, misalnya pada ruang publik. Mengambil sumber pemikiran terutama dari Marx muda serta Weber, teori ini meyakini bahwa alam merupakan konstruksi sosial manusia dalam sejarah yang panjang (Beck, 1995; Beck, Bonss dan Lau, 2003; Blowers, 1997; Friedland, 2001; Pellizzoni, 1999). Masa kemodernan lanjut dicirikan antara lain pada globalisasi, penjarakan ruang dan waktu, berikut dampak kemodernan yang tidak teramalkan, sehingga resiko dikurangi melalui *trust* kepada sistem pakar. Untuk berhubungan dengan alam, manusia menciptakan peran, pandangan terhadap alam, dan pola tindakan –yang sangat dikenal sebagai agensi dan aktor. Bias dari teori ini ialah penggunaannya terbatas pada masyarakat modern tingkat lanjut, yang biasanya diidentifikasi sebagai negara-negara Utara. Tidak ada hubungan masyarakat modern lanjut dari masyarakat tradisional, kedua terpisah, atau kemodernan lanjut melompat dari tradisionalitas.

Bias semacam itulah yang digugat oleh teori poskolonial dan posstrukturalisme dalam ekologi politik. Bersumber dari teori posmodern, alam juga dipandang sebagai konstruksi sosial, namun disertai pandangan bahwa konstruksi tersebut didominasi oleh negara-negara Utara. Dominasi ideologis tersebut menekan kelompok-kelompok marjinal dan masyarakat di negara-negara Selatan (Banerjee, 2003; Escobar, 1996; Haque, 1999). Landasan ontologis ekologi poskolonial juga non-naturalistik, sedangkan diskursus etika lingkungan baru diterima manakala sesuai dengan sikap atau emosi masing-masing individu –posisi metaetika non-kognitif emotivisme. Teori poskolonial dibahas lebih mendalam di bawah.

EKOLOGI POSKOLONIAL

Basis Teori Posmodern

Disadari bahwa terdapat keragaman teori-teori posmodern. Namun demikian pokok-pokok pikiran di dalamnya dapat diringkas. Sebagai kritik terhadap proyek modernisme, teori posmodern diarahkan untuk membongkar dasar logosentrisme bagi pencerahan dunia Barat. Secara ringkas renaisans, dan terutama abad pencerahan, di Eropa dilandasi oleh dominasi akal (*logos*) terhadap aspek kemanusiaan lainnya (Al-Fayyadl, 2005; Foucault, 2002a, 2002b; Said, 1995, 2001; Venn, 2006). Keberadaan manusia lebih ditentukan oleh penggunaan akal (“*Cogito*

ergo sum” (“Aku berpikir maka aku ada”) dalam bahasa Rene Descartes). Disertai dengan pemahaman evolusi, akal bersama sejarah menciptakan paham humanisme, di mana semakin maju masyarakat maka manusia semakin mampu mengelola alam serta masyarakat sekitarnya. Hanya yang lebih ahli dalam menggunakan akalnya – yang yang lebih humanis dalam bahasa Kant—yang memiliki klaim kebenaran untuk mengemansipasi pihak lain yang dipandang lebih rendah.

Teori posmodern secara kuat berkembang sejak kerusuhan di Paris pada bulan Mei 1968 (Macdonell, 2005). Ketidakpuasan (meskipun hanya berlangsung beberapa minggu) diarahkan kepada kapitalisme (aliran Kanan) maupun partai komunis (aliran Kiri). Dengan menafikan keduanya, tidak salah untuk memandang teori posmodern sebagai kritik yang radikal. Kritik yang mendasar ialah penolakan dominasi oleh logos terhadap dunia kehidupan lainnya. Logos tidak sekedar menuju kepada kemajuan melalui pandangan pengembangan rasionalitas, melainkan memiliki peluang sebaliknya dalam bentuk dominasi yang berkuasa terhadap yang ter subordinasi (membentuk dialektika pencerahan). Melalui pemikiran inilah terbuka jalan bagi banyak pihak –termasuk yang selama ini dipandang terbelakang oleh pemikiran humanisme—untuk menunjukkan eksistensi dirinya.

Genealogi Teori Poskolonial

Teori poskolonial banyak menggunakan pemikiran teori-teori posmodern untuk diterapkan ke dalam wilayah bekas kolonialisme Eropa dan Amerika (Said, 2001). Wilayah tersebut terbentang di Asia, Afrika, dan Amerika Latin.

Penggunaan partikel “pos” dalam teori *poskolonial* mengacu kepada analisis posmodern atau analisis diskursus (Said, 1995, 2001). “Pos” bukan mengacu kepada periode analisis terbatas usai penjajahan, namun justru mengkritik kontruksi diskursus sejak masa penjajahan negara Eropa dan Amerika Utara, dan membandingkannya dengan masa sebelumnya di tanah jajahan. Hubungan Barat dan Timur selama era sebelum kolonialisme seringkali dipandang pada posisi setara, di mana Timur memberikan sumbangan kepada Barat (Chattopadhyaya, 2003).

Diskursus tentang masyarakat negara jajahan –yang mulai dibangun sejak era penjajahan Barat—dipandang sebagai bentukan ilmuwan negara-negara Barat. Pembentukan diskursus tidak berlangsung secara netral, melainkan disusun menurut kepentingan Barat dalam mendominasi Timur (subalternisasi) (Bhabha, 2003; Said, 2001). Dengan mengkonstruksi Timur sebagai Pihak Lain (“Other”) dari Barat, sebetulnya tengah dikembangkan konsep konflik dalam ranah konstruktivisme (Abma, 2000). Proses ini dipandang masih berlangsung hingga saat ini, baik secara mendasar dalam konstitusi dan politik negara poskolonial,² bidang ekonomi, pendidikan (Jaya, 2001), dan kemasyarakatan.

Berdasarkan teori diskursus yang dikembangkan dalam teori posmodern, serta metode genealogi untuk membongkar narasi yang diciptakan untuk mendominasi pihak lain, maka –minimal pada awalnya—teori poskolonialisme menggunakan

² Lihat data Go (2003) tentang penulisan kembali konstitusi negara poskolonial menuju sifat Barat, terutama ciri presidensial dan pluralisme. Konstitusi menjadi salah satu aparatus ideologi penting bagi negara untuk melakukan hegemoni kepada rakyat (Althusser, 2004). Perlu dicatat bahwa Go menafsirkan perkembangan ini dalam paradigma modernisasi sebagai diferensiasi, bukan pengaruh Barat terhadap Timur.

bahan-bahan tekstual karya sarjana Barat tentang masyarakat Timur (Said, 2001; Venn, 2006).

Sejak awal disadari keadaan pluralitas kolonialisme, misalnya perbedaan pola penjajahan oleh Perancis, Inggris, Amerika Serikat, dan negara Eropa lainnya. Berkaitan dengan posisi pemikiran tersebut, disadari pula posisi multikultural dalam masyarakat Timur. Subalternisasi tidak hanya berlangsung oleh Barat terhadap Timur, melainkan juga oleh elite terhadap rakyat di Timur sendiri.

Berkaitan dengan itu, bahan-bahan poskolonial juga digali dari teks-teks yang disusun oleh pujangga (*author*) di Timur yang memiliki otoritas (*authority*) membentuk diskursus masyarakat pada masanya.

Berbeda dari sejarah pengembangan teori posmodern dan poskolonialisme yang dikembangkan dari teks-teks di Barat –sehingga muncul kritik bahwa teks tertulis lebih utama untuk menunjukkan tanda daripada bahan tidak tertulis—menurut saya di Timur perlu juga dikembangkan konsep pentingnya teks yang tidak tertulis terhadap teks tertulis. Jika hanya didasarkan pada teks tertulis, maka klaim kebenaran akan dipangku terutama pujangga istana yang elitis. Namun dengan membuka peluang klaim kebenaran pada teks tidak tertulis yang berkembang di tengah lapisan bawah, maka muncul peluang emansipasi lapisan bawah sendiri. Bahwa teks tersebut berkembang secara turun temurun –meskipun pada lapisan bawah—menunjukkan kegunaan

Ekologi dalam Teori Poskolonial

Ekologi politik semula dikembangkan berdasarkan teori marxis. Kritik yang semula dilancarkan Marx terhadap kapitalisme diadaptasi untuk mengkritik modernisasi lingkungan (Vlachou, 2002). Oleh sebab itu kritik dilancarkan terhadap ekonomisasi atau komodifikasi alam.

Namun demikian, kapitalisme pada masa kini tidak sepenuhnya dapat dianalisis secara material, namun lebih berbentuk posmaterial. Jika pada marxisme ortodoks infrastruktur ekonomi dipandang sebagai landasan struktur sosial dan suprastruktur, sejak akhir 1960-an disajikan pola analisis sebaliknya. Ideologi, diskursus, pendeknya suprastruktur, menjadi landasan dan dimaterialkan baik dalam bentuk tindakan sosial maupun pengolahan material alam (Althusser, 2004). Pola pemikiran ini mengarah kepada kritik posmodern terhadap kapitalisme mutakhir. Dengan demikian diskusi tentang ekologi tertuju kepada diskursus ekologi politik.

Ketika digunakan untuk mendiskusikan ekologi di negara-negara Selatan, teori diskursus kemudian diterapkan dalam teori poskolonial. Diskursus di negara-negara Selatan dicurigai sebagai *subalternisasi* Barat (Eropa dan Amerika Utara) atau Utara (yaitu negara-negara industri maju di Eropa dan Amerika Utara, termasuk Jepang) terhadap Timur atau Selatan. Ekologi negara-negara Selatan bukannya ada secara riil, melainkan selalu sebagai bentukan diskursus negara-negara Utara.

Terdapat aspek-aspek teori poskolonial yang diubah dalam untuk menganalisis ekologi politik. Berawal dari dominasi Barat dalam kajian orientalisme, kritik diarahkan kepada pembongkaran diskursus oksidentalisme (perspektif tentang

Barat). Melalui penjajahan negara Barat (Eropa dan Amerika Utara) terciptalah wacana negara-negara kolonial atau jajahan.

Akan tetapi persoalan ekologis bukan mula-mula muncul semasa penjajahan, melainkan terutama sejak 1970-an. Lebih penting lagi, diskursus ekologi dalam ilmu sosial baru berkembang pada masa itu. Dalam ranah internasional, dikenal Perang Dingin yang memunculkan adikuasa Uni Soviet (dengan tulang punggung Rusia), kemajuan Jepang menyetarai Barat, yang bersama-sama Eropa dan Amerika Utara membentuk blok negara maju, misalnya dalam identitas G-8 (delapan negara maju sedunia). Konteks humanisme untuk menunjukkan klaim kemajuan wilayah masih dimiliki negara Eropa dan Amerika Utara (Barat), dan kini ditambah Jepang serta Rusia. Oleh sebab itu wilayah produksi diskursus yang hendak dibongkar tidak sekedar *Barat*, melainkan *Utara*. Adaptasi kewilayahan demikian memungkinkan penggunaan teori poskolonial dalam diskursus ekologi politik.³ (bandingkan dengan Kawada (2003) yang memaknai contoh kemajuan Jepang di Timur untuk tetap menolak dikotomi Barat-Timur, sementara !)

Dalam teori poskolonialisme, ekologi tidak lagi dipandang secara esensial sebagai realitas alamiah (Escobar, 1999). Pengelolaannya tidak selayaknya didekati secara positivistik. Sebaliknya ekologi dipandang diciptakan melalui diskursus, yaitu suatu sudut pandang tertentu terhadap alam. Diskursus dimaterialkan dalam bentuk tindakan-tindakan sosial tertentu serta penciptaan teknologi pengelola alam, yang keduanya diarahkan oleh pandangan yang diambil dalam diskursus di atas. Sebagai kelanjutan kolonialisme, terutama dalam bentuk imperialisme diskursus, maka teori poskolonial memandang diskursus ekologi yang diciptakan oleh Utara merupakan salah satu bentuk dominasi terhadap Selatan.

Diskursus dan Kritik Narasi Besar

Teori diskursus dapat dirunut dari strukturalisme (terutama yang dimulai oleh Levi Strauss) atau marxisme (terutama marxisme strukturalis yang dikembangkan oleh Althusser). Dalam teori ini pembahasan lebih dipusatkan pada diskursus daripada realisme. Minimal terdapat dua aliran dalam teori diskursus, yaitu yang memandang sepenuhnya realitas sebagai semata-mata diskursus –misalnya dikembangkan Hindess (1978), atau realitas sebagai diskursus yang bisa dimaterialkan dalam rupa tindakan atau teknologi yang mencerminkan diskursus yang melandasinya. Memandang seluruh realitas sebagai diskursus semata membutuhkan

Gramsci sudah menunjukkan bahwa aspek suprastruktur dapat menjadi bahan untuk melaksanakan hegemoni lapisan atas terhadap lapisan bawah. Jika suprastruktur dinamakan ideologi, maka aparatus ideologi melakukan dominasi bersama-sama dengan aparatus lain yang bersifat material. Dengan demikian diskursus memiliki aspek ideologi, atau diskursus menggambarkan kekuasaan dan dominasi. Diskursus yang dominan biasanya berbentuk narasi besar.

Narasi besar dalam diskursus lingkungan diciptakan oleh antroposentrisme dan utilitarian. Narasi besar tersebut terekam dalam publikasi yang luas serta kebijakan-

³ Bandingkan dengan Kawada (2003) yang memaknai contoh kemajuan Jepang di Timur untuk tetap menolak dikotomi Barat-Timur, sementara Venn (2006) menggunakan contoh yang sama untuk mengecualikan Jepang dari teori poskolonial.

kebijakan nasional serta internasional tentang modernisasi lingkungan (Bryant, 1998; Walker, 2006; Wilenius, 1999). Lebih jauh lagi, narasi tersebut mendominasi pemikiran dan tindakan hingga ke negara-negara Selatan.

Oleh karena itu, upaya untuk membongkar diskursus bermakna sebagai pembongkaran legitimasi dominan dari narasi besar tersebut (Lyotard, 2004). Lebih jauh lagi, perekaman dan publikasi suara kelompok marjinal di Selatan bermakna sebagai konstruksi diskursus tandingan bagi negara Utara.

Dekonstruksi dan Kritik Logosentrisme

Dengan meletakkan realitas sebagai diskursus, maka kritik dapat dilakukan melalui dekonstruksi diskursus. Semula Heidegger menggunakan konsep dekonstruksi untuk mempertimbangkan kembali ontologi (Ada) ke dalam waktu. Eksistensi sesuatu berlangsung menurut periode waktu tertentu atau waktu secara relatif. Di sini kritik diarahkan kepada keberadaan logos, yang semula selalu ada (karena tidak mempertimbangkan waktu), kemudian menjadi bersifat relatif terhadap waktu tersebut.

Dalam pemikiran Derrida, dekonstruksi digunakan secara radikal untuk mengkritik logos tanpa mempertimbangkan konstruksinya kembali dalam suatu jalinan teks (Al-Fayyadl, 2004). Dengan cara ini dibuka peluang konstruksi oleh semua pihak, termasuk pihak-pihak yang marjinal. Dari sini dibuka penyusunan makna baru yang lebih memperhatikan suara kelompok bawah dan marjinal.

Genealogi dan Kritik Sejarah

Metodologi lainnya untuk mengkritik diskursus didasarkan kepada kajian kesejarahan, yaitu genealogi (Foucault, 2002a, 2002b; Venn, 2006). Sebagaimana diskursus, sejarah tidak diuraikan secara deskriptif, yang genealogi mencari sisi-sisi yang selama ini ditinggalkan dalam penulisan sejarah. Dalam genealogi sengaja dicari tema-tema yang sebelumnya dipandang sudah benar apa adanya. Dalam penulisan lingkungan, misalnya, genealogi sengaja menunjukkan sejarah penguasaan rakyat marjinal terhadap lingkungannya sejak lama. Dengan demikian genealogi memungkinkan penulisan kelompok marjinal di negara-negara Selatan.

Hibriditas dan Kritik terhadap Agensi

Hibriditas menunjukkan upaya mengambil, meminjam, mengubah diri untuk merespons pihak luar (Venn, 2006). Meskipun pada akhirnya berada pada posisi kultural, namun penerimaan kultur hibrid tersebut melalui tindakan sehari-hari yang berlangsung lama. Konsep lain yang sama dengannya dinamakan kreolisme.

Di dalam ekologi politik, maka alam tidak dipandang secara realis dalam esensialisme (Escobar, 1999). Definisi dan kategorisasi lingkungan muncul sebagai hasil dari proses sejarah suatu masyarakat tertentu. Konsekuensinya pada masyarakat lain—yang memiliki pengalaman lain—dapat membangun identitas dan kategorisasi yang berbeda.

Berbasis teori diskursus, maka hibriditas dapat mengaburkan identitas—minimal identitas awal. Sebagaimana kultur yang selalu bersifat campuran (*polyglot*) maka identitas pun bersifat demikian. Ciri *polyglot* ini mengaburkan representasi sosial

dan budaya yang kaku. Ciri ini juga memungkinkan hibriditas terjadi di antara pihak-pihak yang bersetuju pada diskursus atau habitus yang sama. Konsep hibriditas dengan demikian memungkinkan solidaritas antar aktor meskipun lintas kelas, hierarki sosial, atau kategori sosial lain –asal bersetuju dalam diskursus. Solidaritas semacam ini menggugurkan pendekatan berbasis aktor yang bersumber dari konsep agensi, karena agensi masih mengasumsikan representasi sosial.

DISKUSI PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN

Pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) merupakan salah satu narasi besar yang diciptakan negara-negara Utara. Minimal konferensi internasional telah dilaksanakan pada tahun 1987 (pengumuman Komisi Brundtland), kemudian 1992 (*Earth Summit*). Publikasi teoretis maupun praktis perihal pembangunan yang berkelanjutan meningkat pesat sejak 1990-an, bahkan menjadi salah satu yang topik ekologi terkemuka dalam bahasa-bahasa negara-negara Utara (Siniscalco, 1999). Diskursus tersebut juga dimaterialkan dalam kebijakan-kebijakan global dan nasional (tapi disebut “lokal” dalam dokumen *Earth Summit*). Sementara dalam program lain dikembangkan konsep pembangunan hanya bagi Dunia Ketiga (Esteva, 1992), khusus pembangunan yang berkelanjutan mengambil idealisasi kebijakan di negara-negara maju, misalnya Australia, Inggris, Belanda, bahkan EU/*European Union* (lihat Connely dan Smith, 1999; Race, 1999; Taylor, 1998). Mereka mendahului kebijakan sebelum 1997, dengan dasar legitimasi diskursus hasil *Earth Summit*. Riset terhadap kebijakan di negara maju ini kemudian menjadi bahan pengajaran ke negara lain, termasuk ke negara-negara Selatan (lihat Connely dan Smith, 1999; O’Riordan, 1998).

Konstruksi ciri-ciri di atas menunjukkan pokok-pokok yang hendak dikritik ekologi poskolonial. Kritik terhadap humanisme dan logosentrisme (Al-Fayyadl, 2005) diarahkan kepada diskursus dalam laporan Komisi Brundtland (yang kemudian direproduksi ke dalam teks-teks lainnya), bahwa kemanusiaan kita memungkinkan untuk memperbaiki ekologi. Kritik terhadap *tutelage* (Venn, 2006) –posisi pengajar yang lebih tinggi karena lebih menguasai dan mengetahui pengetahuan—atau kaitan erat kekuasaan dan pengetahuan (*power/knowledge*) (Foucault, 2002a) terarah kepada pengajaran pembangunan yang berkelanjutan kepada negara-negara Selatan. Akhirnya tradisi perlawanan dari negara-negara Selatan (Said, 1995) hendak digali untuk menunjukkan diskursus-diskursus yang mampu dibangun oleh negara-negara Selatan.

Sebagai langkah awal hendak ditolak argumen keragaman definisi, kategori dan diskursus pembangunan yang berkelanjutan, yang biasanya muncul di bab awal pada teks-teks pembangunan yang berkelanjutan. Penolakan ini sekaligus melawan argumen demokratisasi yang dipandang melekat dalam proposal pembangunan yang berkelanjutan yang diusulkan negara-negara Utara. Oleh karena itulah saya menyusun **Lampiran 3** untuk menunjukkan bahwa bermacam-macam diskursus ternyata dibatasi oleh posisi etika lingkungan. Hasilnya ternyata jauh dari alasan keragaman di atas, dan sifat-sifat etis dan teoretis yang muncul ini membuka kritik akan peluang dominasi diskursus –sekaligus mengkritik upaya pencampuran posisi pada beberapa teks. Perspektif pembangunan yang berkelanjutan beragam menurut teori antroposentrisme, utilitarian, konstruktivisme modernisme akhir, dan poskolonialisme atau posstrukturalisme. Diskusi di bawah ini akan disajikan dalam

bentuk kritik terhadap posisi teori lain, diikuti argumentasi teori poskolonialisme untuk penyusunan kebijakan politik ekologi.

Kritik Ontologis, Etis, dan Ekologis

Sebagai suatu kebijakan politik modern yang minimal ditentukan sebagai hasil diskusi kelompok kecil maupun masyarakat luas, semestinya pembangunan yang berkelanjutan berpegang pada ontologi non-naturalistik. Dalam pandangan poskolonial, di dalamnya dimungkinkan beragam pendapat didiskusikan untuk mendefinisikan bersama perihal alam.

Oleh karena itu sulit untuk memegang ontologi naturalistik yang dianut antroposentrisme dan utilitarianisme dalam membahas pembangunan yang berkelanjutan. Ontologi ini hanya menyediakan satu pendapat yang dipandang realis. Kemenangan satu pendapat yang dipandang realis tersebut menjadikan ontologi naturalistik berpeluang mendominasi diskursus filosofis pembangunan yang berkelanjutan. Celah dominasi diskursus inilah yang bisa diisi oleh negara Utara dan donor internasional.

Kritik juga diarahkan kepada klaim adanya nilai tentang kebenaran alam, yaitu pada teori etika normatif. Etika normatif yang bersifat teleologis ini dianut oleh antroposentrisme. Ketika kekuasaan turut masuk ke dalam penentuan klaim kebenaran etis tersebut, maka muncul kembali peluang negara Utara dan donor untuk mendesak klaim kebenaran tersebut terutama melalui hasil-hasil riset yang diharapkan obyektif. Misalnya manusia yang *baik* dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan ialah yang melindungi alam (Norton, 1984; Scherer, 1995). Argumen preservasi ini mampu menghilangkan kedaulatan warga di negara-negara Selatan untuk menggunakan hutan di sekitarnya (Escobar, 1996).

Posisi yang juga rentan ialah metaetika yang bersifat kognitif. Meskipun di sini ditolak kebenaran mutlak etika pada teori normatif, namun suatu kesepakatan atas pernyataan etis mengandaikan adanya suatu kebenaran tunggal. Kebenaran tunggal ini lagi-lagi menjadi peluang dominasi diskursus negara-negara Utara dan donor internasional. Oleh karena itu ditolak posisi metaetika-kognitif baik yang bersifat instrumental pada utilitarian (kebenaran etis pembangunan yang berkelanjutan diterima karena berguna untuk kesejahteraan manusia), maupun yang bersifat non-naturalisme pada konstruksi kemodernan akhir. Contohnya upaya penyusunan indikator yang obyektif untuk pembangunan yang berkelanjutan (Connely dan Smith, 1999; Kuik dan Gilbert, 1999; Lawrence, 1998), atau preferensi indikator terbanyak yang ditemukan bersama antara agen pembangunan dan masyarakat (Friedland, 2001), kedua mengandaikan adanya satu kebenaran tunggal yaitu pembangunan yang berkelanjutan.

Di sini diusulkan posisi metaetika non-kognitif yang bersifat emotivisme. Dialog yang dibangun tidak terutama didasarkan pada logos yang rasional (karena mengandaikan ketunggalan rasionalitas), melainkan pada keragaman sikap emotif. Kesadaran emotif muncul dari dinamika tingkah laku dan refleksi sehari-hari, baik secara individual maupun berkelompok. Posisi semacam ini memungkinkan penghargaan yang setara bagi diskursus yang dihasilkan kelompok marjinal.

Kebijakan pembangunan yang berkelanjutan menggunakan konsep kesetimbangan ekologis, membentuk kurva S menuju klimaks ekologi (Bryant, 1998; Scoones, 1999). Sebagaimana disampaikan di muka, posisi ini ditolak karena membuka ruang bagi logosentrisme untuk mendominasi diskursus pembangunan yang berkelanjutan. Keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan di negara-negara Utara, misalnya, dikaitkan pula dengan kemajuan materi dan rasional masyarakat di sana (Race, 1999). Ketika ditambah konsep adaptasi, terbuka peluang penekanan agar negara-negara Selatan menerima diskursus pembangunan yang berkelanjutan yang diusulkan negara-negara Utara (Fernando, 2003; Haque, 1999).

Pandangan ekologis yang diajukan ialah instabilitas ekologis (Bryant, 1998; Robbins, 2004). Pemikiran ini bisa melihat kerentanan masyarakat modern terhadap resiko degradasi lingkungan. Sampai di sini dimungkinkan sikap maladaptasi, yaitu menolak usulan-usulan dari Utara. Akan tetapi teori poskolonial mengusulkan hibriditas di mana warga lokal berkuasa sendiri untuk mengolah percampuran diskursus lokal dan luar dalam tindakan dan pemikiran sehari-hari (Escobar, 1999). Dengan kata lain, kekuasaan dimaknai secara progresif sebagai kemampuan untuk memberdayakan diri dan praksis sehari-hari.

Kritik Pembangunan

Konsep pembangunan (*development*) sudah dikenal lama untuk menjelaskan perubahan sosial masyarakat Utara maupun Selatan. Akan tetapi usai Perang Dunia Kedua konsep pembangunan memiliki arti tersendiri (Edelman dan Haugerud, 2005; Esteva, 1992). Bersamaan dengan diskursus pembangunan, diciptakanlah konsep Dunia Ketiga, negara terbelakang, negara sedang berkembang, atau negara-negara Selatan. Dengan kata lain, negara-negara Selatan tidak eksis dengan sendirinya, melainkan tercipta dalam diskursus pembangunan yang disusun negara-negara Utara.

Logosentrisme menerangi pandangan keterbelakangan negara Selatan, yang secara evolutif selayaknya mengejar negara maju. Pada awalnya digunakan statistika, yang digunakan secara bersama-sama antara Utara dan Selatan. Logos di balik statistika ialah kuantitas atau banyak dipandang *baik* (Foucault, 2002a, 2002b)—yang segera mengingatkan pada prinsip utilitarian. Statistika tersebut langsung menunjukkan kekurangan Selatan sekaligus kelebihan Utara dalam pembangunan yang berkelanjutan (Fernando, 2003). Hal ini menjadi legitimasi bagi *tutelage* Utara terhadap Selatan agar mengikutinya.

Ciri evolutif juga membuka peluang suatu perencanaan pembangunan yang berkelanjutan (Escobar, 1992b, 1996). Perencanaan merupakan penyusunan diskursus di masa depan, dan tidak dapat dinyatakan sebagai realisme. Hanya saja diskursus tersebut terutama dibangun oleh ahli atau elite. Diskursus perencanaan kemudian mendisplinkan pihak lain (*Other*) yang justru tidak terlibat dalam perencanaan. Ciri *tutelage* penyusun diskursus perencanaan muncul, misalnya di Indonesia, dalam posisi sebagai nara sumber yang memberikan pengarah isi perencanaan dalam jangka waktu singkat—sehingga tidak memungkinkan dialog (Anwar dan Hadi, 1996).

Humanisme mendasari pandangan bahwa negara Utara lebih maju sehingga lebih humanis. Merekalah yang dipandang dan mendapat legitimasi untuk memajukan

negara-negara Selatan. Pembangunan yang berkelanjutan berlangsung secara internasional. Meskipun semula negara maju dan donor internasional yang memberikan utang, namun kini mereka menyalahkan negara Selatan, terutama petani dan warga desa, sebagai penyebab degradasi mutu lingkungan –sambil tetap memberikan utang bagi perbaikan lingkungan (Escobar, 1996). Bersamaan dengan itu, kesenjangan antara negara Utara dan Selatan melebar, baik dalam aspek ekonomi, pendidikan, maupun kerukunan masyarakat lokal (Fernando, 2003).

Humanisme ala Kantian juga muncul dalam bentuk pemberdayaan bagi Yang Lain (*Other*), terutama dalam konsep pengembangan kapasitas (*capacity building*). Menurut Kant, seorang yang dewasa –yang ternyata maksudnya Barat, menurut Said (2001) dan Derrida (Al-Fayyadl, 2004)—menjadi seorang humanis, dan dalam dirinya terkandung tugas (deontologis) untuk memberdayakan (meng-humanis-kan) orang lain yang belum dewasa (warga negara-negara Selatan). Pengembangan kapasitas dalam terang humanisme, dengan demikian, merupakan salah satu *tutelage* untuk menguatkan diskursus pembangunan yang berkelanjutan versi negara-negara Utara.

Pembangunan yang berkelanjutan dalam versi di atas jelas ditolak teori poskolonial. Yang diusulkan ialah pembangunan sebagai wujud solidaritas bersama, atau wujud dari hibriditas (Escobar, 1999; Robbins, 2004). Komodifikasi bantuan, utang, dan program pembangunan tidak diperlukan (Haque, 1999). Di atas telah disebutkan bahwa pembangunan sebagai solidaritas sosial dapat muncul sebagai pemberdayaan dari pelaku pembangunan sendiri, sehingga solidaritas dari pihak luar hanya dimungkinkan secara sukarela atau emotivisme. Contohnya utang luar negeri tidak bisa diterima, kecuali hibah yang masih bisa menjadi sumber dana dari pihak luar.

Kritik Ekonomi Formal

Selama ini kritik paling banyak dialamatkan kepada landasan ekonomi formal sebagai penyusun kebijakan pembangunan yang berkelanjutan. Proposisi yang dikritik ialah “pembangunan ekologi mampu berjalan bersama pertumbuhan ekonomi”. Dalam pernyataan yang spesifik, preservasi alam merupakan sumberdaya untuk pertumbuhan ekonomi (Connely dan Smith, 1999), sehingga indikator yang dituju mencakup indikator pertumbuhan ekonomi (terutama GNP/*Gross National Product*), indikator kerusakan alam (karena menginginkan preservasi), dan indikator kemiskinan ekonomi (kontras dengan kemajuan ekonomi warganegara maju). Di sini kebijakan pembangunan yang berkelanjutan mendasarkan diri pada ekonomi formal, terutama pada pasar pencipta harga.

Bagi penganut kebijakan ini, kelebihan dan kelemahannya antara lain terletak pada pelaksanaan pasar pencipta harga ekologi. Faktor yang selalu dipandang sebagai penunjang pelestarian alam ialah bekerjanya pasar terhadap hasil alam tersebut (Race, 1999). Sementara itu, kelemahan yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan ini dipandang sebagai pencerminan kegagalan pasar dalam memberikan insentif bagi pelestarian alam, sekaligus kegagalan aspek non-pasar dalam memberikan insentif pelestarian serupa (Saxena, 1997).

Namun demikian, ternyata kesalahan terhadap lingkungan ditimpakan kepada penduduk miskin dan pedesaan (Banerjee, 2003; Escobar, 1996) –orang miskin

itulah yang mengakibatkan pasar kapitalis rusak. Perusakan pasar tersebut sejalan dengan dakwaan atas penggundulan hutan, desertifikasi, longsor, dan sebagainya. Pola argumentasi demikian bahkan dikekalkan dalam buku-buku teks di sekolah-sekolah.

KRITIK ISI PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN:

Biologi, Fisika, dan Teknologi

Berbasis teori diskursus, kritik teori poskolonial terhadap pembangunan yang berkelanjutan seringkali terbatas pada unifikasi pemikiran tentang modernisme lingkungan. Kritik semacam ini memang berhasil menunjukkan hegemoni Utara terhadap Selatan. Setelah di atas disajikan beragam “sisi luar” pembangunan yang berkelanjutan, berikut ini disajikan kritik terhadap isi pembangunan berkelanjutan itu sendiri.

Lebih daripada itu, penggunaan data-data biologi dan fisika di negara-negara Selatan menunjukkan hegemoni Barat pada satu sisi, namun sekaligus emansipasi Selatan di sisi lain. Negara-negara Selatan yang tetap mempertahankan diversitas tumbuhan dan hewan merupakan tandingan teknologi Utara yang berupaya mereduksi tetumbuhan dan hewan tersebut (Visvanathan, 2003).

Salah satu jalan konstruksi Utara muncul dalam tumbuhan dan hewan unggul. Teknologi unggul dikonstruksi sebagai humanisme Utara, sekaligus subalternisasi Selatan yang tidak bisa memproduksinya sendiri.

Dalam pembangunan yang berkelanjutan atau ko-manajemen dengan alam, teknologi unggul dipandang sebagai bahan kompetitif yang efisien untuk menjaga kelestarian alam (Race, 1999).

Baik di Selatan maupun di Utara, hegemoni teknologi tinggi dimaterialkan dalam bentuk alokasi yang lebih tertuju kepada lapisan atas daripada lapisan bawah (Race, 1999; Sajogyo, 2006). Konsekuensinya muncul kesenjangan ekonomi yang semakin akut.

Proposal Praksis Ekologi Bersama

Teori yang dikembangkan dari posmodern tidak harus berujung kepada nihilisme (Al-Fayyadl, 2004). Jika kebenaran masih memungkinkan, meskipun tidak ada pada saat ini, tetapi masih hendak dirumuskan secara ideal di masa depan, maka upaya mengkonstruksi kebenaran selalu bersifat dinamis. Konsekuensinya ialah politik yang dinamis untuk selalu mengadakan hibriditas.

Dinamika selalu dimungkinkan dalam politik poskolonial, karena teori ini dikembangkan seraya mempertimbangkan kritik kelompok marjinal secara mendasar, yaitu kritik terhadap diskursus yang berkembang (Said, 1995). Diskursus kritis yang baru memungkinkan praksis secara baru pula, yang bersifat lebih kritis daripada sebelumnya.

Menghindar dari revolusi yang bersifat dadakan, melainkan mengembangkan hibriditas dalam kehidupan sehari-hari, maka selayaknya negara-negara Selatan menciptakan diskursus bagi dirinya sendiri, terutama yang paling cocok dengan keadaan masyarakatnya sendiri. Hubungan yang erat antara diskursus, tindakan

sosial dan infrastruktur (Althusser, 2004) menunjukkan peluang sekaligus legitimasi bagi penyusunan diskursus oleh masyarakat itu sendiri.

Dalam konteks demikian, suatu politik yang berkaitan dengan ekologi mungkin dibangun dari negara-negara Selatan. Untuk menghindari logosentrisme, maka proses konstruksi tersebut tidak merupakan definisi yang sudah jadi dari pihak yang menguasainya. Berlawanan dengan hal tersebut, politik konstruksi kebenaran senantiasa dipertimbangkan oleh beragam pihak secara dinamis, terutama dari kelompok marjinal. Sejarah (dan perencanaan sebagai implikasinya) dilaksanakan secara dinamis dan selalu dalam posisi “menjadi”, bukan definisi yang sudah jadi (*Being* dalam konsep Heidegger). Konsekuensinya, politik terhadap ekologi juga membuka peluang diskursus oleh pihak-pihak yang selama ini disingkirkan. Klaim kebenaran tidak bisa dipaksakan oleh salah satu pihak, melainkan dipertimbangkan secara bersama-sama –bahkan kebenaran tersebut didefinisikan bersama-sama pula karena bukan sesuai yang sudah jadi atau sudah ada.

Upaya untuk menghindari pihak negara dan swasta seringkali mengarahkan praksis ekologi politik berbentuk gerakan sosial, terutama gerakan lingkungan (Escobar, 1992a; Wapner, 1995). Dengan segera pemikiran ini bisa dikritik, karena penghindaran pihak negara dan swasta didasari pandangan representasi bahwa keduanya mencerminkan pemikiran ekonomi formal terhadap lingkungan.

Lebih jauh lagi, gerakan yang berujud protes ekologis mengarah kepada ritus, yaitu penyusunan simbol atau diskursus baru –yang biasanya ekstrim—untuk menyampaikan pesan-pesan ekologis yang sebetulnya lebih realistis. Oleh karena mengutamakan simbolisasi, masih diperlukan proses untuk mematerialkannya ke dalam praksis keseharian (Szerszynski, 2002).

Di samping itu, jika disadari bahwa masing-masing pihak tidak bersifat homogen, melainkan bersifat plural, maka pandangan yang diwujudkan dalam politik identitas perlu dihindari (Venn, 2006). Pandangan multikulturalisme ini membuka kemungkinan untuk menjalin solidaritas di antara pihak negara, swasta dan masyarakat. Hibriditas juga memudahkan solidaritas lintas level, baik dari tingkat lokal, regional, hingga internasional. Disadari bahwa pada masing-masing pihak terdapat ruang keberagaman aktor dalam menyikapi ekologi. Sikap yang serupa di antara aktor individual (bukan *pihak, agen, atau agensi*) untuk menjalankan praksis yang kritis bersama alam membuka jalan bagi solidaritas bersama.

KESIMPULAN

Kebijakan terhadap ekologi pada saat ini dapat dipandang sebagai teks yang hendak didekonstruksi. Kebutuhan terhadap dekonstruksi tersebut sejalan dengan logosentrisme yang inheren di dalam kebijakan tersebut. Pembangunan yang berkelanjutan, misalnya, memenuhi klaim humanisme Kantian negara-negara Utara untuk menghindari kerugian jangka panjang yang merugikan (mereka).

Dekonstruksi membuka inkonsistensi diskursus modernisasi lingkungan yang hendak dibangun negara-negara Utara. Sebaiknya dekonstruksi dimulai dari pembongkaran posisi ontologis dan etis dari proposisi-proposisi lingkungan –logosentrisme terekam dalam ontologi naturalistik, etika normatif, dan metaetika-kognitif.

Politik poskolonial terhadap ekologi disusun melalui konsep hibriditas. Konsep ini secara kritis dapat mengarahkan penggunaan secara bersama-sama seluruh aspek ekologi bagi semua pihak yang terlibat dalam arti seluas-luasnya. Konstruksi oleh pihak-pihak yang selama ini tertindas dibuka peluangnya, sehingga pluralitas makna bagi ekologi tersebut dimungkinkan. Pluralitas makna inilah yang memungkinkan beragam pihak untuk melakukan hibriditas kultural. Konsep hibriditas memungkinkan solidaritas lintas posisi sosial maupun dari level lokal hingga internasional. Lebih jauh lagi, hibriditas memungkinkan globalisasi dari bawah atau dari kelompok marjinal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abma, TA. 2000. *Dynamic Inquiry Relationship: Ways of Creating, Sustaining, and Improving the Inquiry Process Through the Recognition and Management of Conflict*. In: *Qualitative Inquiry* No. 1 Th. 6.
- Althusser, L. 2004. *Tentang Ideologi: Marxisme Strukturalis, Psikoanalisis, Cultural Studies*. Terjemahan. Yogyakarta: Jalasutra.
- Al-Fayyadl, M. 2005. Derrida. Yogyakarta: LKIS.
- Alvesson, M, K Sköldbberg, 2000, *Reflexive Methodology: New Vistas for Qualitative Research*. London: SAGE.
- Anwar, A., S. Hadi. 1996. *Perencanaan dan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan*. In: Prisma Th. 25 Edisi Khusus.
- Banerjee, SB. 2003. *Who Sustains Whose Development? Sustainable Development and Reinvention of Nature*. In: *Organization Studies* No. 1. Th. 24
- Barry, J. 1999. *Environment and Social Theory*. London: Routledge.
- Beck, U. 1995. *Ecological Politics in an Age of Risk*. Cambridge, UK: Polity.
- Beck, U., W Bonss, C Lau. 2003. *The Theory of Reflexive Modernization: Problematic, Hypotheses adn Research Programme*. In: *Theory, Culture & Society* No. 2 Th. 20.
- Best, S dan D. Kellner, 2003, *Teori Posmodern: Interogasi Kritis*, terjemahan dari *Postmodern Theory: Critical Interrogations*. Malang: Boyan.
- Bhabha, HK. 2003. *Democracy De-Realized*. In: *Diogenes* No. 1 Th. 50.
- Blowers, A. 1997. *Environmental Policy: Ecological Modernisation or the Risk Society?* In: *Urban Studies* No. 5-6 Th. 34.
- Boyce, JK. 2002. *The Political Economy of the Environment*. Cheltenham, UK: Edward Elgar.
- Bryant, RL. 1998. *Power, Knowledge and Political Ecology in the Third World: A Review*. In: *Progress in Physical Geography* No. 1 Th. 22.
- Callicot, JB. 1990. *The Case Against Moral Pluralism*. In: A Light, H Rolston III. 2002. *Environmental Ethics: An Antology*. Malden, MA: Blackwell.
- Chattopadhyaya, DP. 2003. *East-West Cultural Relationship: Some Indian Aspects*. In: *Diogenes* No. 4 Th. 50.

- Connely, J., G. Smith. 1999. *Politics and the Environment : From Theory to Practice, Second Ed.* London: Routledge.
- Costanza, R. 1996. *Ecological Economics: Reintegrating the Study of Humans and Nature.* In: Ecological Applications No. 4 Th. 6.
- Crocker, TD. 1999. *A Short History of Environmental and Resource Economics.* In: JCJM van den Bergh, ed. *Handbook of Environmental and Resource Economics.* Cheltenham, UK: Edward Elgar.
- Deleuze, G. 2002. *Filsafat Nietzsche.* Terjemahan. Yogyakarta: Ikon.
- Denzin, N. 1997, *Interpretive Ethnography: Ethnographic Practices for the 21st Century.* Thousand Oaks: SAGE.
- Edelman, M, A Haugerud. 2005. *Introduction: The Anthropology of Development and Globalization.* In: M Edelman, A Haugerud, eds. *The Anthropology of Development and Globalization: From Classical Political Economy to Contemporary Neoliberalism.* Malden, MA: Blackwell.
- Eder, K. 1996. *The Social Construction of Nature.* London: Sage.
- Escobar, A. 1999. *After Nature: Steps to Antiessentialist Political Ecology.* In: *Current Anthropology* Th. 40 No. 1.
- Escobar, A. 1998. *Whose Knowledge, Whose Nature? Biodiversity, Conservation, and the Political Ecology of Social Movement.* In: *Current Anthropology* Th. 40 No. 1.
- Escobar, A. 1996. *Construction Nature: Elements for a Poststructuralist Political Ecology.* In: S Jones, G Carswell, eds. 2004. *The Earthscan Reader in Environment, Development and Rural Livelihoods.* London, UK: Earthscan.
- Escobar, A. 1992a. *Imagining a Post-Development Era.* In: M Edelman, A Haugerud, eds. 2005. *The Anthropology of Development and Globalization: From Classical Political Economy to Contemporary Neoliberalism.* Malden, MA: Blackwell.
- Escobar, A. 1992b. *Plannning.* In: W Sach, ed. *The Development Dictionary: A Guide to Knowledge as Power.* London: Zed Book.
- Esteva, G. 1992. *Development.* In: W Sach, ed. *The Development Dictionary: A Guide to Knowledge as Power.* London: Zed Book.
- Fernando, JL. 2003. *The Power of Unsustainable Development: What Is to Be Done?* In: *ANNALS* No. 590.
- Friedland, LA. 2001. *Communication, Community and Democracy: Towards a Theory of the Communicatively Integrated Community.* In: *Communication Research* No. 4 Th. 28.
- Foucault, M. 2002a. *Pengetahuan dan Metode: Karya-karya Penting Foucault.* Terjemahan dari P Rabinow, ed. *Aesthetics, Method and Epistemology: Essential Works of Foucault 1954-1984.* Yogyakarta: Jalasutra

- Foucault, M. 2002b. *Power/Knowledge: Wacana Kuasa/Pengetahuan*. Terjemahan. Yogyakarta: Bentang.
- Fox, W. 1984. *Deep Ecology: A New Philosophy*. In: : A Light, H Rolston III. 2002. *Environmental Ethics: An Antology*. Malden, MA: Blackwell.
- Glassman, J. 2006. *Primitive Accumulation, Accumulation by Dispossession, Accumulation by 'Extra-Economic' Means*. In: *Human Geography* No. 5 Th. 30.
- Go, J. 2003. *A Globalizing Constitutionalism? Views from the Postcolony, 1945-2000*. In: *International Sociology* No. 1 Th. 18.
- Goldman, M, RA Schurman. 2000. *Closing the "Great Divide": New Social Theory on Society and Nature*. In: *Annu. Rev. Sociology* No. 26.
- Haque, MS. 1999. *The Fate of Sustainable Development under Neo-liberal Regimes in Developing Countries*. In: *International Political Science Review* No. 2 Th. 20.
- Hayward, T. 1994. *Ecological Thought: An Introduction*. Cambridge, UK: Polity.
- Hindess, B. 1978. *Humanism and Teleology in Sociological Theory*. In: B. Hindess, ed. *Sociological Theories of the Economy*. London: Macmillan.
- Hunnex, MD, 2004, *Peta Filsafat: Pendekatan Kronologis & Tematis*. Terjemahan dari Chronological and Thematic Charts of Philosophies and Philosophers. Bandung: Teraju.
- Jaya, PS. 2001. *Do We Really 'Know' and 'Profess'? Decolonizing Management Knowledge*. In: *Organization* No. 2 Th. 8.
- Kawada, J. 2003. *'East versus West': Beyond Dichotomy and towards an Acknowledgement of Differences*. In: *Diogenes* No. 4 Th. 50.
- Kuhn, TS. 2002. *The Structure of Scientific Revolution: Peran Paradigma dalam Revolusi Sains*. Terjemahan. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Kuik, OJ, AJ Gilbert. 1999. *Indicators of Sustainable Development*. In: JCJM van den Bergh, ed. *Handbook of Environmental and Resource Economics*. Cheltenham, UK: Edward Elgar.
- Lawrence, JG. 1998. *Getting the Future that You Want: The Role of Sustainability Indicators*. In: D. Warburton, ed. *Community and Sustainable Development*. London: Earthscan.
- Lidskog, R. 2001. *The Re-Naturalization of Society? Environmental Challenges for Sociology*. In: *Current Sociology* No. 1 Th. 49.
- Luke, TW. 2002. *Deep Ecology: Living as if Nature Mattered: Devall and Sessions on Defending the Earth*. In: *Organization and Environment* No. 2 Th. 15.
- Lyotard, J-F, 2004, *Krisis dan Masa Depan Pengetahuan*. Terjemahan dari *The Postmodern Condition: A Report on Knowledge*. Bandung: Teraju.

- Macdonell, D. 2005. *Teori-teori Diskursus: Kematian Strukturalisme & Kelahiran Posstrukturalisme dari Althusser hingga Foucault*. Terjemahan. Bandung: Teraju.
- Macnaghten, J., J Urry. 1995. *Towards a Sociology of Nature*. In: *Sociology* No. 2 Th. 29.
- Minteer, BA, RE Manning. 1999. *Pragmatism in Environmental Ethics: Democracy, Pluralism, and the Management of Nature*. In: A Light, H Rolston III. 2002. *Environmental Ethics: An Antology*. Malden, MA: Blackwell.
- Naess, A. 1984. *The Deep Ecology Movement: Some Philosophical Aspects*. In: A Light, H Rolston III. 2002. *Environmental Ethics: An Antology*. Malden, MA: Blackwell.
- Nietzsche, F. 2004. *Ecce Homo: Lihatlah Dia*. Terjemahan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nietzsche, F. 2000. *Sabda Zarathustra*. Terjemahan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Norton, BG. 1984. *Environmental Ethics and Weak Antropocentrism*. In: A Light, H Rolston III. 2002. *Environmental Ethics: An Antology*. Malden, MA: Blackwell.
- O’Riordan, T. 1998. *Civic Science and the Sustainability Transition*. In: D. Warburton, ed. *Community and Sustainable Development*. London: Earthscan.
- Palmer, C. 2002. *An Overview of Environmental Ethics*. In: A Light, H Rolston III. *Environmental Ethics: An Antology*. Malden, MA: Blackwell.
- Pellizzoni, L. 1999. *Reflexive Modernization and Beyond: Knowledge and Value in the Politics of Environment and Technology*. In: *Theory, Culture and Society* No. 4 Th. 16.
- Petersen, A, I Barns, J Dudley, P Harris. 1999. *Poststructuralism, Citizenship and Social Policy*. London: Routledge.
- Proops, JLR. 1999. *Integration and Communication between Environmental Economics and Other Disciplines*. In: JCJM van den Bergh, ed. *Handbook of Environmental and Resource Economics*. Cheltenham, UK: Edward Elgar.
- Race, D. 1999. *A Brief Analysis of Farm Forestry Policy in Australia*. In: *Journal of Environment and Development* No. 3 Th. 8.
- Robbins, P. 2004. *Political Ecology*. Malden, MA: Blackwell.
- Routley (R Sylvan). 1973. *Is There a Need for a New, an Environmental, Ethic?* In: A Light, H Rolston III. 2002. *Environmental Ethics: An Antology*. Malden, MA: Blackwell.
- Said, EW. 2001. *Orientalisme*. Terjemahan Orientalism. Bandung: Pustaka.
- Said, EW. 1995. *Kebudayaan dan Kekuasaan: Membongkar Mitos Barat*. Terjemahan. Bandung: Mizan.

- Sajogyo. 2006. *Ekososiologi: Deideologisasi Teori, Restrukturisasi Aksi (Petani dan Perdesaan sebagai Kasus Uji)*. Yogyakarta: Cindelas.
- Saxena, AK. 1997. *Deforestation: Causes and Sustainable Solutions with Reference to India*. Disertasi tidak diterbitkan. Toronto: Univ. of Toronto.
- Scherer, D. 1995. *The Ethics of Sustainable Resources*. In: A Light, H Rolston III. 2002. *Environmental Ethics: An Antology*. Malden, MA: Blackwell.
- Scoones, I. 1999. *New Ecology and the Social Sciences: What Prospect for a Fruitful Engagement?* In: *Annu. Re. Anthropology* No. 28.
- Sheperd, A. 1998. *Sustainable Rural Development*. London: Macmillan.
- Siniscalco, D. 1999. *Impacts on Economic Theories on Environmental Economics*. In: JCJM van den Bergh, ed. *Handbook of Environmental and Resource Economics*. Cheltenham, UK: Edward Elgar.
- Smith, M. 2001. *The Face of Nature: Environmental Ethics and the Boundaries of Contemporary Social Theory*. In: *Current Sociology* No. 1 Th. 49.
- Szszzynski, B. 2002. *Ecological Rites: Ritual Action in Environmental Protest Events*. In: *Theory, Culture and Society* No. 3 Th. 19.
- Taylor, M. 1998. *Achieving Community Participation: The Experience of Resident Involvement in Urban Regeneration in the UK*. In: D. Warburton, ed. *Community and Sustainable Development*. London: Earthscan.
- Venn, C. 2006. *The Postcolonial Challenge: Towards Alternative Worlds*. London: Sage.
- Visvanathan, S. 2003. *Cultural Encounters and the Orient: A Study in the Politics of Knowledge*. In: *Diogenes* No. 4 Th. 50.
- Vlachou, A. 2002. *Nature and Value Theory*. In: *Science and Society* Th. 66 No. 2.
- Walker, PA. 2006. *Political Ecology: Where is the Policy?* In: *Progress in Human Geography* No. 3 Th. 30.
- Walker, PA. 2005. *Political Ecology: Where is the Ecology?* In: *Progress in Human Geography* No. 1 Th. 29.
- Warburton, D., ed. 1998. *Community and Sustainable Development*. London: Earthscan.
- Wapner, P. 1995. *Politics beyond the State: Environmental Activism and World Civic Politics*. In: *World Politics* Th. 47 No. 3.
- Wilenius, M. 1999. *Sociology, Modernity and the Globalization of Environmental Change*. In: *International Sociology* No. 1 Th. 14.
- Wospakrik, HJ. 2005. *Dari Atomos hingga Quark*. Jakarta: Univ. Atmajaya dan Kepustakaan Populer Gramedia.

Lampiran 1. Teori-teori Etika Lingkungan

TEORI ETIKA	ETIKA LINGKUNGAN	PERNYATAAN ETIS
TEORI ETIKA NORMATIF		
teleologis	antroposentris, individualis-konsekuensialis, holistik, ancaman fisik, spiritual-setan, gudang material kasar, dualisme relijius, dualisme intelektual, ekologi-marxis	alam berbahaya bagi manusia, alam memiliki jiwa setan, alam adalah gudang material kasar yang bisa digunakan manusia sejauh dibutuhkan, manusia diciptakan lebih penting daripada alam lainnya, karena manusia dapat berpikir maka lebih penting daripada alam lainnya
deontologis	individualis-deontologis, kewajiban spiritual/ relijius, hak-hak alam, <i>deep ecology</i>	menjadi kewajiban relijius untuk memelihara alam, seluruh makhluk hidup memiliki hak moral untuk berada
gabungan teleologis-deontologis	-	-
TEORI METAETIKA		
Kognitif		
- supernaturalisme	ciptaan Tuhan, mistisisme, pantheisme	alam adalah ciptaan Tuhan, seluruh benda hidup bersifat sakral, seluruh makhluk hidup memiliki jiwa
- naturalisme		
▪ subyektivisme	humanitarianisme kuno, humanitarianisme	pertikaian dengan hewan menurunkan kemanusiaan manusia, hewan seharusnya bebas dari kesusahan
▪ instrumentalisme	efisiensi, kualitas hidup, kelangsungan lingkungan	suplai barang dan jasa yang disediakan alam terbatas, alam menambah kalitas hidup manusia, kelangsungan manusia tergantung kepada alam dan proses alamiah
- non-naturalisme	generasi mendatang, resiko alam, rasionalitas procedural, komunikatif ekologis	alam akan dibutuhkan generasi mendatang, pernyataan etis harus dikomunikasikan dalam ruang publik
Non-kognitif		
- emotivisme	posstrukturalisme, ekofeminisme-dekonstruktif, poskolonialisme	gerakan sosial sosial disetujui karena sesuai dengan emosi manusia
- imperativisme	Gerakan lingkungan posmaterialisme, ekofeminisme-marxis	karena setuju terhadap alam maka saya melakukan gerakan sosial
- prekriptivisme	-	-
- teori alasan baik	konstruksi sosial atas alam	Persetujuan terhadap hubungan harmonis dengan alam sesuai dengan alasan-alasan baik yang juga disetujui

Sumber: Diolah dari Eder (1996); Hunnex (2004); Minter dan Manning (1999); Palmer (2002); Smith (2001)

Lampiran 2. Teori-teori Lingkungan

Kriteria	Antroposentrisme	Utilitarian	"Deep Ecology"	Marxisme Ekologi	Konstruktivisme Modernisme Akhir	Poskolonial, Posstruktural
Awal perkembangan	1960-an	1960-an	1980-an	1970-an	1990-an	1990-an
Ontologi	naturalistik				non-naturalistik	
Etika lingkungan	normatif-teleologis	metaetika-kognitif-naturalisme - instrumental	normatif-deontologis	normatif-teleologis	metaetika-kognitif-non-naturalisme	metaetika-non-kognitif-emotivisme
Tempat nilai	pada manusia	-	intrinsik dalam alam	pada manusia	-	-
Pencipta nilai	subyektif oleh manusia	-	obyektif pada alam	subyektif oleh manusia	-	-
Pernyataan tentang nilai	-	nilai alam memiliki tujuan yang menarik	-	-	alam memiliki moral obyektif atau realis namun nilai kebajikannya tidak empiris	nilai alam sesuai dengan sikap atau emosi yang diambil manusia
Teori lingkungan	modernisme lingkungan		ekologi politik			
Eksemplar	Norton (1984), Hargrove (1992)	Minteer dan Manning (1999)	Fox (1984), Naess (1986)	Vlachou (2002)	Eder (1996), Blowers (1997), Barry (1999), Beck (2004)	Escobar (1996), Robbins (2004)
Sumber teori	ilmu ekonomi, ekologi	ilmu ekonomi, ekologi	ekologi, politik ekonomi	teori Marx tua, ekologi	teori Marx muda, Weber	teori posmodern, teori diskursus
Asumsi terhadap alam	alam memberikan konsekuensi yang berguna	alam sebagai sumberdaya; sumberdaya alam langka	alam memiliki nilai untuk dihormati	alam dikelola dengan cara mengeksploitasi buruh	alam muncul sebagai hasil pemikiran manusia	alam muncul sebagai pemikiran negara Utara yang digunakan untuk mengkolonisasi negara Selatan
Asumsi kemodernan	Kemodernan hanya berarti kemajuan rasionalitas manusia		Kemodernan merusak alam, tradisionalitas memelihara alam	Kapitalisme merusak manusia dan alam, namun kemodernan berlanjut kepada sosialisme untuk mengatasinya	Kemodernan lanjut bersifat refleksif, di mana pemikiran dan praksis tidak bisa dibedakan	Kemodernan bagi negara Selatan berarti kolonialisme atau imperialisme dari negara Utara
Pendekatan	pragmatisme lingkungan	kelangkaan, preferensi	kerusakan, kepemilikan umum	materialisme, marxisme, feminisme	sejarah lingkungan	poskolonial, studi subaltern, genealogi, hibriditas, dekonstruksi ilmu pengetahuan

Kriteria	Antroposentrisme	Utilitarian	"Deep Ecology"	Marxisme Ekologi	Konstruktivisme Modernisme Akhir	Poskolonial, Posstruktural
Konsep utama	manajemen sumberdaya	efisiensi, kualitas hidup	perilaku beresiko rendah dan tinggi, lembaga sebagai kunci tindakan kolektif	nilai surplus, pembagian kerja dan kekuasaan, eksploitasi, hegemoni	garis batas mengambang, agensi alam	Keterlekatan politik terhadap ilmu sosial, keterlekatan ilmu sosial terhadap ilmu alam
Konsep ekologi yang digunakan	homeostasis, adaptasi, kesetimbangan ekologis			instabilitas, maladaptasi, ketidaksetimbangan ekologis		Instabilitas, hibriditas, ketidaksetimbangan ekologis
Proposisi representatif	makhluk abiotik hanya memiliki nilai untuk digunakan oleh makhluk hidup	preferensi disusun dari makhluk yang bisa menginginkan sesuatu hingga yang tidak bisa melakukannya	sistem manajemen tradisional meminimalkan resiko dan menjadi alternatif tekanan politik dan ekonomi, mengeluarkan kelembagaan lingkungan dalam ekonomi politik menjadikan sistem berjalan dengan salah	perubahan sistem produksi meningkatkan eksploitasi dan degradasi buruh maupun lingkungan; pengelolaan lingkungan dilakukan dengan mengekstraksi buruh marjinal dan sumberdaya	sistem ekologi baru muncul dari persaingan penggunaan lingkungan	Perubahan sosial digunakan untuk mengembangkan dan meningkatkan terhadap kelompok marjinal dan terkolonisasi; perubahan lingkungan digunakan untuk mengontrol manusia dan sumberdaya
Fokus kajian	seluruh masyarakat dunia				terutama masyarakat modern lanjut	terutama masyarakat bekas kolonialisme Eropa, Amerika Utara, dan Jepang

Lampiran 3. Pembangunan yang Berkelanjutan dalam Teori-teori Lingkungan

Kriteria	Antroposentrisme	Utilitarian	Konstruktivisme Modernisme Akhir	Poskolonial, Posstruktural
Teori lingkungan	modernisme lingkungan		ekologi politik	
Eksemplar	Norton (1984), Scherer (1995)	Connely dan Smith (1999), Kuik dan Gilbert (1999), Minter dan Manning (1999)	Warburton, ed. (1998), Sheperd (1998)	Banerjee (2003), Escobar (1996), Haque (1999)
Asumsi	Kelestarian alam memberikan konsekuensi yang berguna bagi pembangunan	alam sebagai sumberdaya bagi kelangsungan pembangunan; sumberdaya alam langka	Pengelolaan ekologi muncul sebagai hasil pemikiran manusia dalam pembangunan yang berkelanjutan	Kebijakan pembangunan yang berkelanjutan muncul sebagai pemikiran tentang alam dari negara Utara untuk mengkolonisasi negara Selatan
Pendekatan	pragmatisme lingkungan	kelangkaan, preferensi	sejarah lingkungan	poskolonial, studi subaltern, dekonstruksi ilmu pengetahuan
Konsep utama	manajemen sumberdaya	efisiensi, kualitas hidup	garis batas mengambang, agensi alam	Keterlekatan politik terhadap ilmu sosial, keterlekatan ilmu sosial terhadap ilmu alam
Konsep ekologi yang digunakan	homeostasis, adaptasi, kesetimbangan ekologis	homeostasis, adaptasi, kesetimbangan ekologis	instabilitas, maladaptasi, kesetimbangan ekologis	ketidaksetimbangan ekologis
Proposisi representatif	Kebijakan pembangunan yang berkelanjutan memiliki nilai ketika bisa digunakan oleh generasi penerus	Kebijakan pembangunan yang berkelanjutan disusun menurut preferensi penggunaan makhluk hidup dan benda mati yang bisa berguna bagi manusia	Perbaikan terhadap pembangunan yang berkelanjutan muncul dari persaingan penggunaan lingkungan	Pembangunan yang berkelanjutan disusun ulang untuk mengembangkan dan meningkatkan posisi kelompok marjinal dan terkolonisasi
Lingkup pembangunan yang berkelanjutan	seluruh masyarakat dunia		terutama masyarakat modern lanjut	terutama masyarakat desa bekas kolonialisme Eropa, Amerika Utara, dan Jepang
Diskursus tentang pembangunan	pembangunan untuk kepentingan manusia masa kini dan masa mendatang	perkembangan ekonomi dan globalisasi sama dengan pembangunan	pembangunan untuk mengembangkan potensi individu dan kelompok	pembangunan sebagai tindakan imperialisme Eropa, Amerika Utara, dan Jepang
Diskursus tentang alam dan masyarakat	alam digunakan untuk masyarakat	alam digunakan untuk pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup manusia	Hubungan antara alam dan masyarakat disusun bersama	masyarakat marjinal telah mengurangi kerusakan lingkungan
Diskursus tentang alam dan pembangunan	pembangunan untuk preservasi alam	pembangunan bisa memperbaiki kerusakan alam	pembangunan yang berkelanjutan merupakan upaya untuk menurunkan resiko pembangunan masa lalu	pembangunan yang didorong oleh Utara telah memberikan kerusakan kepada alam
Agensi dalam	pemerintah, donor,	pemerintah, donor,	pemerintah,	seluruh pihak yang

Kriteria	Antroposentrisme	Utilitarian	Konstruktivisme Modernisme Akhir	Poskolonial, Posstruktural
kebijakan	lembaga internasional	lembaga internasional	masyarakat, LSM, swasta	menyetujui diskursus yang sama
Masyarakat baru yang dituju	masyarakat yang mempertimbangkan generasi penerus	masyarakat yang selalu menghitung ekologi dalam pengambilan keputusan	masyarakat yang selalu mempertimbangkan sejarah resiko lingkungan dalam tindakan	masyarakat marjinal memiliki suara yang setara dengan masyarakat maju dalam menjalin interaksi dengan lingkungan

